

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI RABU
16 AGT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



**MEDIA KALTIM PARTNERSHIP TRIP KE WAGUB HADI MULYADI:
DARI 'REUNI' HINGGA KLIEN PERTAMA**

**MUDA
DINAMIS
AMANAH**



**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG



Hadi Mulyadi saat menerima poster cover e-paper dirinya dari CEO Media Kaltim Group, Agus Susanto. (Adhi)

MEDIA KALTIM PARTNERSHIP TRIP KE WAGUB HADI MULYADI: DARI 'REUNI' HINGGA KLIEN PERTAMA

SAMARINDA – Partnership trip Media Kaltim Group kali ini berkesempatan mendatangi Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, pada Selasa, (15/8/2023) malam. CEO Media Kaltim Grup, Agus Susanto, dan Manager Area Samarinda sekaligus Direktur Radar Media, Adhi Abdhian, diterima di rumah jabatan Wagub.

Sesi kali ini berlangsung menarik. Tanpa diduga, Media Kaltim turut berkesempatan berbincang dengan Masykur Sarmian, politisi senior dari Komisi II DPRD Kaltim. Karena pernah menjadi pewarta politik dan bertugas di DPRD, Agus Susanto dan Adhi Abdhian merasa seperti 'reuni' dengan kedua tokoh politik senior tersebut.

"Dulu bersama Pak Hadi, saat beliau masih menjadi wakil rakyat, dan Pak Masykur,

sering bertemu karena mereka adalah narasumber kompeten saya di desk politik. Seringkali data dan informasi dari mereka menjadi headline di media saya saat itu," ujar Agus.

Ikatan antara Wagub Hadi dan Media Kaltim juga spesial. Hadi Mulyadi merupakan pejabat pertama yang 'percaya' memasang iklan di Media Kaltim saat pertama kali beroperasi. "Kami merasa sangat bangga dan termotivasi karena mendapat kepercayaan memasang iklan sekelas wakil gubernur. Tidak hanya sekali, semua penawaran iklan dari Media Kaltim, asalkan momennya sesuai, selalu diterima baik oleh Pak Hadi. Untuk itu, kami sangat berterima kasih," papar Agus.

Wagub Hadi, yang juga gemar menulis, sangat akrab dengan dunia jurnalistik. Salah satu pu-

tranya kini meniti karier sebagai jurnalis di salah satu media online kaltimkece.id, jejaring Mediakaltim.com.

"Anak saya lebih fokus pada tulisan berita mendalam dengan penjabaran yang panjang, melibatkan beberapa narasumber, dan data akurat. Memang, passion dia di dunia tulis menulis sejak SMA," kata Hadi.

Terkait media, Hadi Mulyadi meyakini bahwa media online memiliki peran penting dalam sosialisasi dan pengawalan program pemerintah daerah. Peran Media Kaltim, yang kini hadir dengan e-paper mobile, memberikan banyak pilihan bagi pembaca untuk menikmati informasi akurat. "Semoga Media Kaltim semakin berkembang dan terus berinovasi dalam penyajian beritanya," pungkasnya. (rs1)

MKP MEDIA KALTIM PROMOSINDO



RAMAIKAN
& IKUTI
EVENT
NYA
YUK

MEMAKAI
KUPON
DIGITAL
RP.5 RIBU

ACARA PUNCAK HUT MEDIA KALTIM :

27 AGUSTUS 2023

JALAN SEHAT



LAPANGAN EX. TEMINDUNG SAMARINDA
MULAI PUKUL 06.00 WITA

INFORMASI :
+62 821-5783-0863
05348943982



Paket **MAKSIMAL** Karyawan

(Makan Siang Hemat Lengkap Untuk Karyawan)

Paket Ber2

Rp **90rb** nett
/pax

Paket Ber3

Rp **130rb** nett
/pax



Pilihan 7 Menu Khas Nusantara

- 1 Ikan Dori Saus Telur Asin
- 2 Ikan Dori Asam Manis
- 3 Ayam Geprek Cabe Hijau
- 4 Ayam Bakar Taliwang
- 5 Rendang Daging Padang
- 6 Ikan Nila Masak Tauco
- 7 Ikan Nila Goreng Colo-Colo

FREE

1 pax comp.
Light Meal





SR saat diamankan petugas Lapas Samarinda.

BOTOL LOTION ISI SABU GAGAL MASUK LAPAS SAMARINDA

SAMARINDA - Seorang pria berinisial SR (34) diamankan petugas Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Samarinda lantaran kedapatan hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 15 gram untuk warga binaan di dalam Lapas. Penyelundupan itu berhasil digagalkan petugas pada Senin (14/8/2023).

Untuk mengelabui petugas, kristal mematikan itu disembunyikan oleh SR di dalam sebuah botol lotion dan bak sampah.

"Kita dapati sabu kurang lebih 15 gram yang disembunyikan pelaku di dalam lotion 2 bungkus, dan diselipkan di bak sampah satu bungkus," ucap Kalapas Kelas IIA Samarinda Hudi Ismono, Selasa (15/8/2023).

Hudi menceritakan, awalnya SR memang datang untuk menitipkan makanan dan barang guna diberikan kepada salah seorang warga binaan berinisial RD.

Sesampainya di meja pemeriksaan, SR sempat menunjukkan gelagat mencurigakan. Ia gugup seperti ada yang ia sembunyikan. Melihat itu, petugas pengamanan kemudian semakin curiga dan melakukan pemeriksaan terhadap barang titipan SR.

"Barang-barang dan makanan itu ren-

cananya ditujukan ke warga binaan berinisial RD," terangnya. Benar saja, petugas menemukan narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam botol lotion. Tak hanya itu, petugas juga mendapati sabu di bagian bawah bak sampah yang dibawa SR.

"Modusnya, sabu itu ditaruh di dalam botol dan diisi cream lotion, dan sabu yang lain disembunyikan di celah-celah bak sampah yang ada di bawahnya," ungkapnya.

Dari temuan itu, petugas kemudian mengamankan SR untuk selanjutnya diserahkan ke Polresta Samarinda guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara warga binaan RD langsung dipindahkan petugas Lapas ke ruang sel isolasi.

"Barang bukti dan pelaku kita serahkan ke pihak berwajib, untuk warga binaan yang terlibat kita kirim ke sel isolasi," bebernya. Dikonfirmasi terpisah, Kanit Lidik Satreskoba Polresta Samarinda Iptu Purwanto mengatakan dalam hal ini SR hanya bertugas sebagai kurir. Dia menyebut SR mendapatkan upah Rp 1 juta dari salah seorang yang berada di luar Lapas.

"Dia diupah Rp 1 juta sekali antar sabu itu," jelas Purwanto. **(vic)**



kiri Sekretaris Disdukcapil HM Subhan dan kanan Kepala BPBD Samarinda Suwarso. (Hanafi)

DISDUKCAPIL DAN BPBD SAMARINDA TEKEN PKS PEMANFAATAN DATA BAGI KORBAN BENCANA

SAMARINDA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda meneken Perjanjian Kerjasama (PKS) pada Selasa (15/8/2023) digedung Disdukcapil yang berada di jalan Basuki Rahmat Samarinda Kota.

Usai penandatanganan PKS, Kepala BPBD Samarinda Suwarso, mengatakan tujuan PKS tersebut adalah mempermudah bagi masyarakat untuk mengakses data kependudukan yang terdampak bencana alam baik itu kebakaran, banjir dan bencana lainnya.

"Mempermudah masyarakat dalam pemanfaatan data atau akses data bagi warga yang berdomisili daerah yang rawan bencana yang sedang atau tinggi Termasuk korban korban bencana," katanya.

Kerja sama yang dilakukan oleh Disdukcapil Samarinda dan

BPBD Samarinda juga sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan minimum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

"Kita coba penuh itu, itu juga upaya untuk meningkatkan index ketahanan daerah kota Samarinda," ungkapnya.

Suwarso juga berharap dengan kerjasama ini index ketahanan kota Samarinda terhadap bencana makin tinggi.

"Mudah-mudahan setelah kita laksanakan kerjasama ini index Ketahanan kota Samarinda juga makin tinggi masyarakatnya juga semakin tangguh," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Samarinda HM Subhan berharap kerjasama ini bisa menjadi contoh bagi pemda-pemda lainnya.

"Semoga kerjasama ini menjadi contoh bagi Pemda lainnya," ujarnya. Dia juga mengatakan ini adalah target dari pemerintah pusat agar setiap daerah ada ker-

ja sama antar lembaga daerah seperti yang dilakukan oleh Disdukcapil Samarinda dan BPBD Samarinda ini dengan tertulis di atas kertas.

"Ini lembaga yang pertama melakukan kerjasama dengan kita (Disdukcapil red), nanti akan ada lembaga lembaga yg lainnya," ungkapnya.

Adapun adanya kerja sama ini bisa menjadi berkah bagi kedua lembaga pemerintah daerah tersebut. "Semoga ada berkah bagi penandatanganan kerja sama ini" katanya.

Dengan ditandatanganinya PKS ini, warga yang terdampak bencana akan diberikan kemudahan untuk mengurus dokumen kependudukannya yang hilang. Terutama masyarakat yang sudah membuat KTP elektronik otomatis datanya sudah ada dalam database. Inovasi dan kerjasama ini dilakukan guna meminimalisir masyarakat yang menjadi korban bencana alam. **(han)**



Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto, S.H., M.H (IST)

BAWASLU KALTIM AMBIL ALIH TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA

SAMARINDA - Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) Hari Dermanto mengungkapkan bahwa Bawaslu Kaltim melakukan pengambilalihan sementara wewenang dan kewajiban

Bawaslu Kabupaten dan Kota. Hal tersebut disampaikan melalui keterabgab persnya pada Selasa (15/8/2023).

Keputusan ini dilakukan, lantaran masa jabatan Bawaslu Kabupaten dan Kota Se- Kaltim untuk periode 2018- 2023 telah berakhir terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 lalu. Sedangkan untuk pejabat penerus Bawaslu Kabupaten dan Kota periode 2023 - 2028 belum diumumkan dan belum dilantik sampai siaran pers ini dibuat.

Padahal saat ini persiapan sudah memasuki 2 tahapan yang sedang berlangsung di tingkat Kabupaten dan Kota.

"Yang pertama adalah tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten/ Kota yang dimulai pada tanggal 12- 18 Agustus 2023. Yang kedua adalah penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dimulai tanggal 26 April 2023- 7 Februari 2024," ungkap Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengawasan terhadap kedua tahapan tersebut harus tetap berlangsung.

"Mengingat Bawaslu Kabupaten/ Kota periode 2023-2028 belum diumumkan dan belum dilantik maka Bawaslu Kaltim mengambil alih pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten dan Kota sampai dengan dilantiknya pejabat Bawaslu Kabupaten/

Kota terpilih," ujarnya.

Pengambilalihan wewenang Bawaslu Kabupaten dan Kota oleh Bawaslu Kaltim tersebut sudah sesuai dengan UU yang berlaku. "Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban oleh Bawaslu Kalimantan Timur ini sesuai dengan ketentuan Pasal 99 huruf (e) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum," terangnya.

Dalam surat tersebut Ketua Bawaslu juga menegaskan kepada koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten dan Kota, agar tetap melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan sebagaimana adanya dan memfasilitasi semua tahapan pengawasan yang sedang berjalan, serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten dan Kota Se- Kaltim berkoordinasi kepada Bawaslu Kaltim. **(han)**



7 PROLEGDA PPU 2023 DITETAPKAN, PENGUATAN REGULASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK



**PERTAHANKAN ADIPURA, PEMKAB PPU
RUMUSKAN CARA KERJA
DAN KEBUTUHAN ANGGARAN**



Penandatanganan berita acara penetapan Prolegda PPU 2023 dalam Rapat Paripurna, Sabtu (12/8/2023) lalu. (Robbi/MediaKaltimGroup)

7 Prolegda PPU 2023 Ditetapkan, Penguatan Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

PPU - Eksekutif dan legislatif telah menyepakati rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk dalam program legislatif daerah (prolegda) 2023. Mayoritas Raperda yang akan dilahirkan tahun ini berkaitan dengan penguatan regulasi penyelenggaraan pelayanan pemerintah terhadap publik.

Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD PPU, Sudirman menyebutkan tahun ini ada 7 Raperda yang telah ditetapkan. Ada 3 di antaranya merupakan usulan dari DPRD PPU dan 4 sisanya merupakan usulan dari Pemkab PPU.

"Terdapat 7 Perda yang akan diajukan agar dapat dibahas dalam Pansus (panitia khusus). Yaitu 3 perda insiatif DPRD dan 4 dari Pemerintah Kabupaten," ungkap Sudirman pada Selasa (15/8/2023).

Dari inisiatif legislatif ialah Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam. Lalu Raperda tentang Zonasi Nilai Tanah di Kabupaten PPU. Kemudian Raperda tentang Penanaman Modal.

"Awalnya kami targetkan ada 10 Raperda yang akan masuk ke Prolegda. 4 dari DPRD dan 6 dari Pemkab PPU. Tapi dari hasil rapat, disepakati hanya 7," sebutnya.

Sementara inisiatif dari Pemkab PPU, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Raperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah; Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pembentukan Perangkat Daerah.

"Selanjutnya kami bentuk 2 pansus, dengan masa kerja 3 bulan, dengan opsi perpanjangan. Kami targetkan selesai dalam waktu secepatnya," tegas Sudirman.

Untuk diketahui, kesepakatan Prolegda ini telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna, Sabtu (12/8/2023) lalu. Baik Pemkab PPU dan seluruh Fraksi di DPRD PPU telah menyempatkan padangannya dalam agenda tersebut.

Bupati PPU Hamdam Pongrewa mengungkapkan secara umum Raperda yang akan dibahas tahun ini memiliki urgensi untuk segera diterbitkan regulasinya. Salah satunya soal Raperda ini mengatur perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Raperda ini berkaitan erat dengan peningkatan pelayanan terkait perizinan dan penanaman modal. Pun atas terbitnya PP 6/2021 tentang penyelenggaraan perizinan dan perizinan berusaha, yang menjadi rujukan penyelenggaraan perizinan secara nasional di daerah.

"Peraturan ini memberikan arah lebih lanjut tentang tugas dan fungsi dari DPMPTSP. Terutama bab ketentuan penutup dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan pemerintah tersebut," jelasnya.

Adapun ketentuan Pasal 18 dan pasal 40 dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Menjelaskan tentang variable dan tata cara skoring untuk menetapkan tipologi bagi perangkat daerah di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 1 dalam pera-

turan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. DPMPTSP seharusnya tidak lagi berbentuk tipologi. Sehingga tipologi pada perangkat daerah tersebut harus dihapus karena sudah tidak relevan dengan peraturan yang ada," lanjutnya.

"Hal ini dibutuhkan mengingat wilayah Kabupaten PPU secara geografis, hidrologis dan klimatologis sangat memungkinkan terjadi berbagai bencana," ucapnya.

Kondisi alam seperti itu dapat menimbulkan risiko bencana yang tinggi. Hamdam menyebutkan pula sebagian besar wilayah PPU berada dalam kawasan rawan bencana.

Memang benar, mulai dari ancaman banjir, kekeringan, gelombang pasang atau abrasi, tanah longsor, gempa. Termasuk pula kebakaran hutan dan lahan serta angin puting beliung bahkan termasuk tsunami.

"Walaupun bencana berskala besar tersebut mungkin masih dianggap jauh dari terjadinya di daerah kita, namun potensi bencana apapun akan selalu ada. Sehingga kesiapsiagaan adalah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melindungi warganya secara maksimal untuk menghindari resiko yang lebih besar terhadap kejadian bencana," bebernya.

Sementara untuk Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, menurutnya regulasi ini disusun dengan didasarkan pada pemahaman akan permasalahan yang dihadapi. Bahwa penyelenggaraan perpustakaan belum berjalan maksimal, karena banyak hal yang berhubungan dengan masalah dukungan regulasi. **(sbk)**

PERTAHANKAN ADIPURA, PEMKAB PPU RUMUSKAN CARA KERJA DAN KEBUTUHAN ANGGARAN



Piala Adipura kategori kota kecil yang diraih Pemkab PPU 2022. (Robbi/Me-

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) berupaya untuk mempertahankan Piala Adipura pada 2023 ini. Salah satunya dengan mengonsolidasikan penanganan sampah pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU.

Pada 2022 lalu, PPU akhirnya kembali menerima penghargaan Piala Adipura kategori kota kecil. Berkat beberapa peningkatan pengelolaan sampah yang baik di seluruh lingkungan Benuo Taka.

Adapun saat ini juga tengah memasuki tahapan penilaian Adipura untuk tahun ini. Untuk mempertahankan itu, ada beberapa indikator yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU, Tita Deritayati menuturkan untuk melawati penilaian itu tidak mudah. Ada beberapa poin penting dari berbagai aspek dan faktor pendukung yang mesti terpenuhi.

"Memang tidak mudah, dan saya sedikit pesimis dengan kondisi keterbatasan anggaran yang ada," ungkap dia, Selasa (15/8/2023).

Ada 2 poin penting dalam penilaian Adipura. Yaitu, pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Soal pengurangan sampah ini yakni berkaitan dengan mengubah perilaku masyarakat.

Kemudian juga mengajak untuk membuat bank sampah dengan beberapa kelompok masyarakat yang peduli lingkungan.

"Karena memang salah satu faktor penentunya itu adalah pengolahan sampah," ujar Tita.

Sementara untuk penanganan sampah, berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, fokusnya ialah untuk menekan timbunan sampah minimal 60 persen, dari seluruh masyarakat di Benuo Taka.

"Timbunan sampah bila dilihat dari perhitungan, masih belum mencapai apa yang menjadi target 60 persen. Layanan yang ada di PPU masih di bawah 50 persen," bebernya.

Tita mengungkapkan untuk memenuhi penilaian itu, membutuhkan komitmen bersama. Khususnya dari tataran pemerintahan dengan seluruh perangkat yang ada.

Untuk diketahui, baru-baru ini Setkab PPU menggelar rapat koordinasi lintas OPD, khusus untuk mempersiapkan pemantauan penilaian Adipura 2023. Dari pertemuan itu, dukungan untuk menyelesaikan berbagai kendala yang harus dibenahi bisa teruraikan. Utamanya soal sarana dan prasarana pendukung yang berkaitan dengan sampah.

"Namun tahun ini, kami tetap optimis. Dengan dukungan Ba-

pak Bupati dan seluruh SKPD yang ada, serta masyarakat Kabupaten PPU, tentunya Piala Adipura 2023 masih dapat kita raih," kata Tita.

Dalam rapat tersebut, seluruh OPD yang berkaitan dengan kedua poin tadi wajib turut langsung membantu. Bukan hanya memberikan dukungan, tapi membantu langsung menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam proses penilaian Adipura tahun ini.

"Memang ada istilah bahwa mempertahankan itu lebih susah dari pada meraih. Kita tentu harus optimis bisa mempertahankan Piala Adipura di tahun 2022 lalu. Tetapi tentunya harus dibarengi dengan kerja keras dan perjuangan kita semua untuk mewujudkan itu," kata Bupati PPU Hamdam Pongrewa.

Melalui rapat ini pula, ia mengonsolidasikan seluruh perangkat menjadi tim yang solid. Merumuskan berbagai strategi cara kerja yang dapat dijalankan, beserta anggaran yang dibutuhkan.

"Saya berharap Piala Adipura ini bisa Kita dapatkan kembali. Termasuk support pendanaannya silakan dirumuskan dengan baik. Sehingga tujuan penilaian Adipura ini tidak boleh dikatakan tidak ada anggarannya lagi," tutup Hamdam. **(sbk)**



DIDUGA DIBUANG, JASAD BAYI USIA 2 MINGGU DITEMUKAN DI AREA PEMAKAMAN

**DPRD-PEMKAB KUKAR SEPAKAT,
APBD-P TEMBUS RP 11,8 T**





Sekkab Kukar, Sunggono, bersama Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid dan Wakil Ketua DPRD Kukar, Siswo Cahyono setelah menandatangani dokumen. (Ady/Radar Kukar)

DPRD-PEMKAB KUKAR SEPAKAT, APBD-P TEMBUS RP 11,8 T

TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-15, masa sidang ke III di Ruang rapat paripurna DPRD Kukar, Selasa (15/8/2023).

Rapat kali ini dengan agenda Laporan Badan Anggaran (Banggar) dan kesepakatan bersama terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2023.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, dan dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono tersebut, disepakati bahwa pada APBD-P Kukar tahun ini mengalami peningkatan anggaran. Yakni, dari Rp 7,8 triliun menjadi Rp 11,8 triliun atau mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp 3 triliun.

Dengan peningkatan anggaran yang terbilang sangat besar ini, Rasid menyampaikan secara langsung kepada Sekkab Sunggono, sebagai pimpinan aparaturnya pemerintah di

Kukar untuk memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap realisasi APBD-P ini. Tujuannya, agar pelaksanaannya bisa dilakukan secara maksimal dan tidak menghasilkan silpa.

"Tentunya kita berharap kegiatan ini bisa dimaksimalkan. Supaya memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan pembangunan di Kukar," harapnya.

Rasid juga menjelaskan, peningkatan anggaran yang terbilang sangat besar ini, mayoritas bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas dan batu bara. Setelah pembahasan ini, ia menuturkan bahwa selanjutnya hasil rapat ini akan diteruskan ke provinsi untuk dilakukan evaluasi.

"Nanti mungkin setelah di evaluasi provinsi ini nanti akan segera kita tetapkan," kata Rasid.

"Target kita bulan ini, kan perubahan ini mepet, intinya kalau bisa secepatnya kita tetapkan. Supaya penyerapannya bisa maksimal," begitu tutupnya. (adv/tabs)



Proses evakuasi jenazah korban yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tim kesehatan. (Istimewa)

DIDUGA DIBUANG, JASAD BAYI USIA 2 MINGGU DITEMUKAN DI AREA PEMAKAMAN

TENGGARONG - Warga Kelurahan Sarijaya, Kecamatan Sangasanga, dikejutkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan. Tepatnya di area pemakaman umum yang terletak di RT 9, Kelurahan Sarijaya.

Awalnya, jasad bayi malang tersebut ditemukan pada Selasa (15/8/2023), sekitar pukul 11.30 WITA. Pertama kali ditemukan oleh warga bernama Yasir (41). Saat itu dirinya sedang mengantar jenazah salah satu warga.

Saat melintasi batas tanah pemakaman, ia melihat ada sesuatu yang mencurigakan dan dikerumuni oleh lalat. Karena merasa curiga, ia pun memberanikan diri untuk mengecek dan melihat. Benar saja, ia menemukan sesosok mayat bayi malang sudah tidak bernyawa lagi.

"Jasad pertama kali ditemukan oleh saudara Yasir, saat berjalan melihat batas tanah pemakaman dan melihat ada sesuatu yang sedang dikerumuni oleh lalat. Kemudian karena merasa penasaran saksi mendekati, dan dikejutkan dengan sosok bayi yang ada dalam keadaan meninggal dunia," terang IPTU Suranto, Kapolsek Sangasanga, Selasa (15/8/2023).

Setelah menerima laporan penemuan jasad bayi tersebut, pihak Kepolisian bersama tim medis langsung menuju TKP untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Diperkirakan bayi malang yang baru berusia dua minggu tersebut, telah meninggal sekitar 24 jam sebelum ditemukan.

"Korban ditemukan dalam keadaan diselimuti sarung," pungkasnya. **(tabs)**



Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Ahmad Yani. (Ady/Radar Kukar)

RDP Bersama Pemkab, 5 Raperda Siap Disahkan DPRD Kukar

TENGGARONG - Pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) terus berlangsung di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Untuk membahas 5 buah Raperda, yang mana 3 di antaranya adalah Raperda terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Raperda terkait RTRW tersebut diantaranya Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Ruang Terbuka Hijau dan Perlindungan Petani dan Nelayan. Selain itu 2 buah Raperda lainnya yang dibahas adalah Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Serta rencana usulan pengajuan Raperda di Luar Program Pembentukan Daerah (Propemperda) Tahun 2023.

Rapat ini dilangsungkan di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar, pada Senin (14/8/2023) kemarin. Dipimpin oleh Ketua Bapemperda Kukar, Ahmad Yani, beserta anggota, Firnandi Ikhsan.

Pimpinan rapat, Ahmad Yani, menjelaskan. Pembahasan Raperda hari ini merupakan bagian dari persiapan pengesahan. Hanya saja beberapa Perda RTRW masih terkendala di provinsi dan masih perlu kesepakatan pihak eksekutif. Meski secara substansi telah disetujui, namun masih perlu persetujuan eksekutif untuk pengesahannya.

"Juga ada usulan pengajuan raperda di luar Propemperda yang berkaitan dengan pengelolaan sarang burung walet dan kebencanaan. Ini telah dilakukan fasilitasi tinggal menunggu pengesahan. Tetapi karena tidak masuk Propemperda sehingga kita akan masukkan di luar (Propemperda)," kata legislator dari Dapil V tersebut.

Ahmad Yani juga mengatakan,

Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, membahas terkait pemisahan bidang Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Raperda pemisahan ini termasuk sebagai urgensi sesuai kesepakatan panitia khusus (pansus). Sehingga ke depannya akan melalui mekanisme tata tertib, terhadap pemisahan bidang kebudayaan untuk mengoptimalkan penganggaran.

Selain kelima Raperda ini, Yani juga mengaku optimis bahwa DPRD Kukar mampu merampungkan pembahasan 24 Raperda lainnya yang ditargetkan tahun ini.

"Kami yakin 24 Raperda, termasuk Perda wajib yang saat ini sudah berjalan 75% dapat disahkan. Dan ke depan kami minta pemerintah daerah ketika pembahasan, revisi, mengambil keputusan di Bapemperda harus dihadiri eksekutif. Kami harap ke depan wajib hadir," tutup Ahmad Yani. (tabs)



SERAGAM GRATIS SD MOLOR, PENGUKURAN MURID JADI KENDALA

BACA HALAMAN A2



Tangkap Ikan Pakai Bom, Nelayan Bontang Kuala Terancam Hukuman Seumur Hidup

BACA HALAMAN A7



Penjahitan seragam gratis SD di LPK Ayulia di Salebba.

Seragam Gratis SD Molor, Pengukuran Murid Jadi Kendala

BONTANG – Pengerjaan seragam gratis untuk pelajar SD terlambat dari target waktu yang telah ditentukan. Pengerjaan ditargetkan rampung Bulan Juli lalu, namun molor hingga Agustus 2023 ini. Saat ini progres masih 85 persen.

Pimpinan dan Pendiri Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Ayulia, selaku koordinator penjahit seragam di Bontang, Nurhayati menjelaskan, molornya pembagian seragam SD karena kurangnya kerjasama antara pihak sekolah dengan penjahit.

"Ada beberapa SD yang saat kami mau mengukur mereka tidak merespon, apalagi kami sempat vakum selama sebulan, karena data ukuran yang juga terlambat," jelasnya saat

ditemui redaksi Selasa (15/8/23).

Pengukuran seragam SMP dan SD dinilai berbeda. Hal itu lantaran untuk murid SD yang akan masuk ke SMP lebih mudah diketahui, karena pengukuran dilakukan ketika mereka masih SD kelas 6. Sementara itu siswa SD harus resmi diterima dulu baru bisa diambil data dirinya.

Seragam dan atribut yang sudah selesai langsung dipacking sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Terdapat kurang lebih 50 SD Negeri dan swasta yang akan menerima seragam gratis seragam tersebut.

Untuk sistem pembagiannya, pihak LPK menyerahkan langsung ke Dinas Pendidikan. Sebelum dibagikan seragam akan lebih dulu dibawa ke

gudang dan akan disortir, juga dipasang-pasangkan dengan sepatu dan tas.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan, Saparuddin mengatakan, pendistribusian seragam ini masih dalam waktu pembagiannya sehingga masih dalam target. Akan dibagikan secara simbolis di SD Negeri 1.

"Estimasi memang di Agustus untuk pembagian. Kalau dulu bisa cepat karena pakai konveksi. Sekarang kita pakai penjahit lokal, ada proses mengukur dan jahit, wajar kalau lebih lama, karena yang ditangani ada 3 ribu siswa," beber Saparuddin.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam



Inovasi PUPR Tangani Banjir, Bentuk Panbers Bantu Normalisasi Sungai

BONTANG – Pemkot Bontang dalam hal ini Dinas PUPR berinovasi dalam upaya penanggulangan banjir di Bontang. Dinas PUPR berkolaborasi dengan masyarakat dan stakeholder untuk menormalisasi Sungai Dahlia.

Inovasi yang dilakukan Dinas PUPR adalah membentuk Pasukan Bersih Sungai (Panbers) yang terdiri dari 33 anggota, untuk membantu pemerintah dalam normalisasi endapan lumpur di aliran drainase dan sungai.

Dinas PUPR pun meresmikan Panbers dalam Launching Teman Bolang, Selasa (15/8/2023) di Halaman Masjid Al-Baqarah, Jalan Sukun Raya Gang Jati 3, Kelurahan Satimpo.

Launching Teman Bolang merupakan strategi pemerintahan untuk kolaborasi penanggulangan banjir di Bontang, dan normalisasi Sungai Dahlia bersama panbers.

Kepala PUPR Kota Bontang Usman mengatakan, banjir ini merupakan masalah kita bersama, karenanya kita bersama-sama bisa bergandeng tangan untuk mengatasi masalah banjir ini. Antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder berkolaborasi menyelesaikan permasalahan ini.

"Dengan adanya Pasukan Panbers ini kita upaya lakukan percepatan. Masyarakat bisa mengadukan permasalahan-permasalahan terkait banjir, kami akan survei lokasi, bikin perencanaan, lalu penanganan. Mekanismenya seperti itu," bebernya.

Dijelaskannya, Panbers merupakan masyarakat yang digaji harian, untuk membantu pengerjaan normalisasi sungai. Lantaran tidak semua pengerjaan normalisasi sungai bisa dikerjakan dengan alat, namun ada



YUSVA ALAM

Wali Kota Bontang, Basri Rase melantik Anggota Panbers di Launching Teman Bolang.



Pasukan Panbers saat membantu normalisasi Sungai Dahlia.

juga dengan cara manual. Dengan cara manual inilah Panbers bekerja.

"Kami akan terus konsisten bersama Panbers untuk normalisasi seluruh Sungai Dahlia di Bontang. Panbers akan dilibatkan di setiap program bersih-bersih sungai," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase hadir dalam Launching Teman Bolang sekaligus meresmikan Panbers. Wali Kota berharap

dibentuknya Panbers dapat membantu percepatan penanganan banjir di Bontang.

"Kami konsen dalam penanggulangan banjir sampai membentuk Panbers ini," ujar Wali Kota dalam sambutannya.

Pewartu: Yusva Alam
Editor: Yusva Alam



DISDAMKARTAN FOR RADARBONTANG.COM

Kondisi toko pasca kebakaran.

Toko Depan SMKN 1 Nyaris Terbakar, Penjual Pentol Tersambar Api

BONTANG - Satu toko kelontong di Jalan Cipto Mangunkusumo atau tepatnya di seberang SMKN 1 nyaris ludes terbakar, Selasa (15/8/2023). Hal itu diduga disebabkan kebocoran pada tabung gas elpiji 3 kg.

Selain nyaris terbakar, akibat kejadian itu seorang penghuni toko berinisial B menjadi korban. Tubuhnya tersambar api dari kebocoran gas elpiji tersebut.

"Korban mengalami luka bakar sekira 75 persen. Saat ini sudah dirawat di rumah sakit. Korban merupakan penyewa toko tersebut yang berjualan pentol dan kelontongan,"

ujar Kadisdamkartan, Amiluddin.

Berdasarkan rilis dari Disdamkartan Bontang, kejadian itu berlangsung sekira pukul 07.00 wita pagi tadi.

Dari pengakuan Niyatun, istri korban, saat itu korban sedang beraktivitas memasak. Namun karena ada kebocoran tersebut, api menyambar tubuh korban.

Penanganan pertama api dibantu Jusmiati, tetangga korban menggunakan air yang disiramkan ke korban terbakar. Ditambah selimut basah ke kompor gas. "Kemudian api dipadamkan oleh pemilik ruko, Abdul Aziz menggunakan Apar,"

imbuhnya.

Kemudian datang petugas damkar untuk memadamkan api yang tersisa dan mengamankan barang-barang yang berpotensi terbakar.

Luas toko yang nyaris terbakar ini sekira 2 M2. Penyewa diperkirakan mengalami kerugian aset mencapai Rp 6,5 juta.

Armada dan peralatan yang diturunkan Disdamkartan di antaranya 1 unit Mobil Fire Truck, 2 unit Mobil Supply dan menurunkan 15 Personil Damkar.

Editor: Yusva Alam



Rendy Agipta (kaos coklat) di Polsek Kaliorang bersama rekannya (paling kanan).

Sudah Ditemukan, Ini Motif Pelajar SMKN 2 Pergi dari Rumah Tanpa Pamit

BONTANG - Rendy Agipta, pelajar SMKN 2 Bontang yang dilaporkan hilang beberapa waktu lalu di media sosial sudah ditemukan di daerah Kaliorang, Kutim. Rupanya Rendy hanya ingin ikut teman sekolahnya pulang ke kampung halamannya di Kaliorang.

"Salah satu teman sekolahnya di SMKN 2 itu orang Kaliorang, temannya itu beda jurusan saja sama dia. Pas libur akhir pekan temannya itu mau pulang, jadi Rendy ikut," jelas Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prasetya melalui Kasi Humas Polres Bontang, Iptu Mandiyono saat pers rilis di Mako Polres Bontang, Selasa (15/8/2023)

Diceritakan, teman dari Rendy berencana hanya pulang pergi, tidak menginap, namun sayangnya saat perjalanan motor mengalami kerusakan. Di rumah temannya tersebut tidak ada satupun anggota keluarganya, sehingga mereka belum bisa kembali ke Bontang.

"Sesampai di rumah temannya di Kaliorang, orang tuanya tidak ada. Katanya mereka berdua tidak ada yang bawa HP, jadi pinjam HP orang di sana untuk menghubungi ibunya Rendy dan orang tua temannya," tambahnya.

Setelah mengetahui anaknya berada di Kaliorang, tepatnya di Desa Bukit Makmur, Arbaenah langsung

menghubungi Polres Bontang terkait keberadaan anaknya. Lalu pihak Polres Bontang yang menghubungi Polsek Kaliorang dan sigap mencari keberadaan Rendy.

"Lokasi mereka 17 kilometer dari Polsek. Setelah ketemu jadi langsung dibawa," ucapnya

Mandiyono menjelaskan, bahwa mereka sempat akan pulang setelah 17 Agustus, namun karena mereka masih sekolah, akhirnya dibujuk agar pulang secepatnya, mereka pun mengiyakan dan pulang pada Selasa (15/8/23) pagi ini.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam



IST

Penyerahan paket sembako kepada perwakilan veteran Achmad Saleh oleh Badak LNG.

Sambut HUT RI, Badak LNG Berbagi Paket Sembako ke Veteran Kemerdekaan

BONTANG - Dalam rangka menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia, Badak LNG menyelenggarakan kegiatan aksi sosial bagi para veteran yang tinggal di Kota Bontang. Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, Badak LNG ikut bergabung dalam program Komunitas Bergerak sebagai wujud aksi sosial insan Badak LNG dalam perayaan HUT RI tahun ini.

Pada kegiatan ini, dibagikan paket sembako dan uang tunai kepada enam anggota veteran dan janda veteran. Bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Bon-

tang, bantuan ini diserahkan pada Selasa (15/8) ke kediaman masing-masing.

Achmad Saleh, salah satu veteran yang telah berusia 100 tahun, mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan oleh Badak LNG. Dirinya turut mendoakan agar Badak LNG dapat terus memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Bontang.

Pjs. Senior Manger Corporate Communication & General Support Badak LNG, Putra Peni Luhur Wibowo, menyatakan pemberian bantuan ini merupakan bentuk penghar-

gan dan perhatian dari perusahaan atas jasa-jasa dan perjuangan yang telah dilakukan para veteran terhadap bangsa dan negara.

"Mewakili Manajemen Badak LNG saya mengucapkan terima kasih kepada para veteran yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi para keluarga veteran," ucap Luhur.

Selanjutnya, ia berharap peringatan HUT Ke-78 RI ini dapat dijadikan momentum untuk kembali memupuk persatuan dan meneladani jiwa patriotisme para pahlawan. (rls)



SYAKURAH/RADARBONTANG

Pers rilis penangkapan nelayan menggunakan bom saat menangkap ikan.

Tangkap Ikan Pakai Bom, Nelayan Bontang Kuala Terancam Hukuman Seumur Hidup

BONTANG - Seorang oknum nelayan ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan menggunakan bom untuk menangkap ikan. Hal ini diungkap saat pers rilis di Mako Polres Bontang, Selasa (15/8/23).

Pelaku berinisial DW (35) warga Kelurahan Bontang Kuala ditangkap, Senin (14/8/23) saat akan berangkat mencari ikan pada pukul 5.30 pagi.

Sehari sebelum penangkapan, warga setempat memberikan laporan, terdapat nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan.

"Setelah melakukan pengintaian, kami mendapatkan 3 pelaku, satu orang tersangka dan sisanya masih

sebagai saksi mata," beber Kapolres Bontang, AKBP Yusep Dwi Prasetya melalui Kasat Polairud Polres Bontang, Iptu Khairul Umam.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa 4 botol berberisi pupuk cantik dan bubuk pemicu, sumbu yang digunakan untuk mengaktifkan peledak, satu buah korek, satu perahu ketinting dan satu set alat selam.

Pelaku mengaku bahwa aksinya ini sudah dilakukan selama 3 bulan terakhir. DW sendiri melakukan pengeboman karena mata pencahariannya yang merupakan seorang nelayan.

"Saya harap tidak ada nelayan yang kembali menggunakan metode ini, karena berbahaya bagi biota laut dan diri sendiri. Bisa saja meledak saat membuat bom tersebut," jelasnya.

Pelaku mempelajari pembuatan bom dari kerabat atau tetangga, dan pelaku menerapkan hal tersebut untuk mendapatkan tangkapan ikan yang lebih cepat.

Akibat perbuatannya, pelaku terancam undang-undang darurat pasal 1 ayat satu dengan hukuman penjara seumur hidup.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam



PEMKAB BERAU SALURKAN GAS MELON RP 25 RIBU PER TABUNG



DIUNDANG KE JAKARTA, BUPATI SRI JUNIARSIH MAS
MENERIMA PENGHARGAAN UPAKARY
WANUA NUGRAHA



Operasi pasar murah Elpiji 3 kg seharga Rp 25 ribu di GOR Pemuda.

Pemkab Berau Salurkan Gas Melon Rp 25 Ribu per Tabung

TANJUNG REDEB - Menyikapi susahnya membeli Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau Elpiji 3 kg di Kabupaten Berau, Pemkab Berau menggandeng agen penyalur gas melon untuk operasi pasar murah Elpiji 3 Kg selama empat hari, sejak 14-28 Agustus, di Gedung Olahraga (Gor) Pemuda.

Kasubag Bina Perekonomian Setkab Berau, Indah Ariani menegaskan, bahwa tidak ada kelangkaan untuk membeli gas melon di Bumi Batiwakal. Adapun suplai Elpiji 3 kg selama ini sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. Yakni diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan UMKM.

Memang diakui, belum lama ini ada sedikit kendala karena kapal yang menuju Kabupaten Berau harus terhenti lantaran cuaca yang tidak mendukung.

"Sehingga proses pengiriman sedikit mengalami keterlambatan. Tapi saat ini kapal juga sudah datang dan bisa memenuhi kebutuhan," ungkapnya, kemarin (14/8/2023).

Operasi pasar Elpiji 3 kg kali ini pihaknya menyediakan stok sebanyak 1.120 tabung untuk dijual ke masyarakat di Kecamatan Tanjung Redeb. Dengan mengacu harga sesuai SK Bupati Berau dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 25 ribu per tabung. Syaratnya hanya fotokopi KTP sesuai kecamatan.

"Jumlah yang sama juga akan disalurkan ke 3 kecamatan lain. Yakni, Gunung Tabur, Sambalung dan Teluk Bayur," terangnya.

Ia berharap, operasi pasar murah tersebut mempermudah masyarakat membeli dan mendapatkan gas melon untuk

keperluan rumah tangga dan sehari-harinya.

"Kami akui operasi pasar Elpiji 3 Kilogram ini tidak terlalu maksimal. Namun itu menandakan bahwa benar tidak ada kelangkaan yang terjadi pada stok gas LPG tersebut," pungkasnya.

Sementara itu ditemui terpisah, salah seorang masyarakat Kecamatan Tanjung Redeb, Abu Bakar mengungkapkan bahwa dirinya sangat terbantu dengan operasi pasar Elpiji 3 kg ini. Selain karena stoknya melimpah, juga harga yang diberikan jauh lebih murah dari membeli di penampungan yang biasa ia kunjungi.

"Saya sangat terbantu sekali. Stok di pasaran sudah banyak. Jadi lebih baiknya lagi jika pelaksanaan operasi pasar Elpiji 3 kg ini dilaksanakan di waktu terjadi kelangkaan," harapnya. (mnz)



DIUNDANG KE JAKARTA, BUPATI SRI JUNIARSIH MAS MENERIMA PENGHARGAAN UPAKARYA WANUA NUGRAHA

TANJUNG REDEB - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mendapat undangan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk hadir pada pembukaan temu karya nasional dan penganugerahan penghargaan desa dan kelurahan berprestasi tahun 2023 sebagai rangkaian dari kegiatan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Bupati Sri Juniarsih diundang hadir dan akan menerima penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Tahun 2023, yang akan digelar di Hotel Discovery Ancol Jakarta, pada Selasa Malam (15/8/2023).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau, Tentram Rahayu, mengatakan undangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI,

tertanggal 14 Agustus 2023 telah diterima pihaknya. Undangan tersebut ditujukan kepada tujuh gubernur serta delapan bupati dan wali kota se Indonesia, salah satunya Bupati Berau bersama Wali Kota Balikpapan dan Gubernur Kalimantan Timur.

"Sesuai dengan undangan yang Kami terima, Bupati Berau menjadi salah satu penerima penghargaan upakarya wanua nugraha, Ibu Bupati rencana akan hadir langsung," ungkapnya.

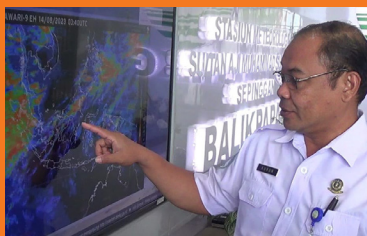
Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah sebagai pembina desa sebagai apresiasi oleh Menteri Dalam Negeri atas prestasi dan komitmen dalam memajukan desa dan kelurahan di wilayahnya. Penghargaan upakarya wanua nugraha ini dikatakannya akan menjadi yang kedua kali diterima Bupati Berau, setelah pada tahun

2022 juga diterima bersama dengan diraihnya juara satu lomba desa yang diraih Kampung Sumber Agung. "Tahun lalu kita menerima dan Alhamdulillah tahun ini ibu bupati diundang untuk menerima penghargaan ini," ucapnya.

Bersamaan dengan ini disampaikan Tentram Rahayu, Kepala Kampung Labanan Makarti yang telah masuk tiga besar lomba desa tingkat nasional juga diundang untuk hadir pada acara ini, sekaligus pengumuman juara dan penyerahan hadiah langsung dari menteri dalam negeri. "Kita optimis Berau kembali meraih juara 1 lomba desa dari regional III, ini seiring dengan kembali diterimanya anugerah upakarya wanua nugraha untuk Bupati Berau," tandasnya. **(RN/Prokopim/dez)**



KOMISI III DPRD BALIKPAPAN SIDAK PERBAIKAN DRAINASE DI BARAU ULU



**BMKG BALIKPAPAN SEBUT EL NINO
BAKAL SAMPAI OKTOBER**



Para pemain dan pelatih Persiba di acara jumpa penggemar di Hotel Royal Suite, Balikpapan, Selasa 15/8/2023. (ANTARA/novi abdi)

PERSIBA BALIKPAPAN PULANG KANDANG DISAMBUT JUMPA PENGGEMAR

BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan tiba kembali di Kota Minyak setelah hampir dua bulan menjalani pemusatan latihan di Jakarta, dengan kedatangan mereka disambut acara jumpa penggemar atau meet and greet yang digelar di Hotel Royal Suite, Selasa (15/8/2023).

"Kami siap berkompetisi, siap memberikan yang terbaik," kata Pelatih Persiba Nil Maizar, Selasa, di depan puluhan pendukung klub. Ia mengatakan bahwa target Persiba musim ini ialah kembali ke Liga 1. Untuk pertama kali juga dua pemain asing Persiba diperkenalkan secara resmi kepada publik Kota Minyak. Untuk kompetisi Liga 2 kali ini, klub berjuduk Beruang Madu itu diperkuat striker Luiz Junior asal Brasil dan gelandang Ali Nouri dari Iran

Dari sekian pertanyaan dan permintaan kepada pelatih dan

pemain, adalah permintaan dari guru olahraga SMAN 5 Balikpapan yang ditanggapi antusias oleh para pemain.

"Kalau boleh, saya ingin ajak pemain untuk berkunjung ke sekolah, dan memberikan motivasi bagi para siswa kami," kata Herman, yang merupakan mantan bek Persiba saat kompetisi masih bernama Liga Dunhill di tahun 1994.

SMAN 5 Balikpapan terkenal memiliki tim sepak bola yang cukup kuat, selain juga tim bola basket yang disegani di tingkat pelajar. Harapan Herman itu disambut dengan baik oleh M Robby, bek Persiba sekarang dan pernah lama membela tim nasional di posisinya.

"Kalau kami diundang, dengan izin pelatih dan manajemen, insyaallah kami akan datang. Apalagi untuk memotivasi anak-

anak," kata Robby.

Pada kesempatan itu juga Pelatih Nil Maizar mengingatkan kapan terakhir dia berada di Balikpapan sebelum menjadi pelatih Persiba. "Terakhir ke Balikpapan itu tahun 2016 waktu itu masih menukangi Semen Padang," kata Nil.

Kemudian, saat menangani Sriwijaya FC, tim juara Liga 1 yang juga terjerembab ke Liga 2, Nil sudah pernah merasakan bertemu kekuatan Beruang Madu di babak delapan besar saat ditukangi Pelatih Haryadi.

"Sekarang kita maksimalkan semua kekuatan untuk hasil terbaik," kata Nil.

Pada 17 Agustus ini, Persiba akan menjamu PSCS Cilacap dan 19 Agustus melawan PSPS Pekanbaru dalam laga uji coba. Liga 2 akan dimulai pada September 2023. **(Ant/MK)**



Komisi III DPRD Balikpapan melakukan sidak drainase di kawasan jalan Wolter Monginsidi RT 31 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat.

Komisi III DPRD Balikpapan Sidak Perbaikan Drainase di Baru Ulu

BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Kota Balikpapan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di proyek peninggian jalan dan drainase, Senin (14/8/2023) kemarin.

Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan warga jalan Wolter Monginsidi RT 31 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat terkait proyek peningkatan peninggian badan jalan dan drainase yang dikerjakan PT Azka Jaya Kontruksi yang menggunakan APBD 2023 sebesar Rp 3,8 miliar.

"Adanya laporan pengerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur. Drainase yang tengah dibangun keadaannya berbelok," ujar Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri saat di konfirmasi, Selasa (15/8/2023).

Dalam sidak ini Komisi III DPRD Kota Balikpapan juga turut memanggil Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Camat Balikpapan Barat dan perwakilan warga setempat.

Usai meninjau proyek, Alwi

menjelaskan, proyek peningkatan badan jalan yang berada di lokasi Jalan Wolter Monginsidi Balikpapan Barat tidak sesuai prosedur dan drainase berbelok dan sempat beberapa hari ini viral di media sosial.

"Adanya keluhan warga, ketebalan jalan, yang mana rumah di sini ada 30-40 tahun agak rendah sehingga waktu dibangun tinggi jalan ini agak mencolok. Pada prinsipnya itu sudah sesuai usulannya," jelasnya.

Menurut Alwi, pembangunan jalan ini merupakan usulan Komisi III, karena adanya teriakan warga mengenai jalan rusak di wilayah ini. Dan akhirnya diusulkan dan diperbaiki tetapi timbul protes warga.

"Untuk ketinggian 30-40 cm, karena di sini kendaraan yang melintas bertonase besar, kalau dibawah akan hancur lagi," tambahnya.

Sementara masalah drainase yang bengkok alias tidak lurus,

merupakan langkah kontraktor yang telah memenuhi pertimbangan.

"Kontraktor ini akan senang sebenarnya kalau mengerjakan drainase lurus, tapi kan ada kendalanya tiang PLN dan pipa PDAM," ujar Alwi lagi.

"Kalau namanya proyek jika masih terlihat amburadul untuk sementara dinilai wajar, hingga proyek ini selesai dikerjakan, sehingga mohon pengertian dari warga sekitar," tambahnya.

Alwi berharap agar masyarakat sekitar bisa terus mendukung proyek tersebut agar cepat rampung. Apalagi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN), maka dengan adanya pembangunan drainase sebagai kutipan sedia payung sebelum hujan.

"Memang ini bukan kawasan banjir, tapi pembangunan drainase iniantisipasi tahun kedepannya," tutupnya. **(ADV/DPRD-Balikpapan/Bom)**



Kepala BMKG Kota Balikpapan, Kuku Ribudiyanto saat menjelaskan El Nino Moderate.

BMKG BALIKPAPAN SEBUT EL NINO BAKAL SAMPAI OKTOBER

BALIKPAPAN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Balikpapan memprediksi jika El Nino yang saat ini tengah melanda laut Pasifik bakal terjadi hingga bulan Oktober mendatang.

El Nino saat ini masuk kategori Moderate, yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu di permukaan laut Pasifik khususnya di bagian Tengah dan Timur.

Kepala BMKG Kota Balikpapan, Kuku Ribudiyanto mengatakan, fenomena alami ini menyebabkan anomali pola cuaca global, yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia.

"Kondisi ini kita prediksi terjadi hingga Oktober mendatang," ujarnya, Selasa (15/8/2023).

Lebih lanjut Kuku menjelaskan, BMKG Kota Balikpapan akan terus melakukan pembaharuan data setiap 10 hari ke depan untuk mengetahui kondisi El Nino Moderate tersebut.

"Nanti di awal November baru ada hujan, meskipun memiliki intensitas ringan tapi sudah masuk peralihan musimnya," jelasnya.

Adapun dampak dari El Nino ini yang paling dirasakan adalah kemarau yang menyebabkan kekeringan. Dan pada tahun ini bisa termasuk kemarau yang berkepanjangan.

"Tapi saat ini meski kemarau bukan berarti tidak ada potensi turun hujan. Peluang hujan tetap ada namun masuk kategori hujan lokal dan intensitasnya sangat rendah sekali," tutupnya. **(bom)**



PERKARA HP HILANG, DIREKTUR AIR MINUM TIRTA KANDILO KENA SEMPROT DPRD



MULYANI CALON PAW UMAR DI DPRD KABUPATEN PASER



Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi menerima surat jawaban

MULYANI CALON PAW UMAR DI DPRD KABUPATEN PASER

PASER - Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Paser, Umar sisa masa periode 2019-2024 mulai mengemuka. Yakni, Mulyani yang meruoakan Plt. Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Paser.

KPU Kabupaten Paser telah menyerahkan surat jawaban ke Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi perihal permohonan PAW untuk daerah pemilihan (Dapil) IV. Yakni Kecamatan Pasir Belengkong, Batu Engau dan Tanjung Harapan.

"Setelah kami lakukan klarifikasi calon PAW, nomor urut dengan suara berikutnya Muhyidin tidak memenuhi syarat. Sehingga perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Mulyani," kata Ketua KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid, Selasa (15/8/2023).

Lanjut Qayyim, dengan telah menyerahkan surat jawaban ke ketua DPRD Paser dalam hal perolehan suara terbanyak berikutnya yang memenuhi syarat. Maka tugas dari

KPU telah selesai. "Tahapan selanjutnya di DPRD Paser," jelasnya.

Sementara itu, Hendra Wahyudi menuturkan proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Paser, Umar usai adanya surat dari DPP PBB. "Kami langsung menindaklanjuti terkait surat yang masuk dari DPP PBB," tuturnya.

Biasanya perihal surat PAW diberikan oleh DPC atau paling tidak tingkat provinsi. "Tapi ternyata ini langsung dari DPP PBB. Point intinya proses PAW Umar karena pindah partai," sebutnya.

Usai menerima surat jawaban dari KPU Paser, pihaknya akan segera meneruskan kepada bupati Paser. Kemudian ke Gubernur dan Kemendagri. "Kalau sudah ada putusan, nanti kami tinggal persiapan proses PAW," tutup Hendra.

Sekadar diketahui, Umar yang saat ini anggota Komisi III DPRD Kabupaten Paser memilih pindah ke Partai Golkar untuk kembali bertarung pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang. (bs)



RDP Komisi
Gabungan DPRD
Kabupaten Paser
dengan Perumda
Air Minum Tirta
Kandilo

PERKARA HP HILANG, DIREKTUR AIR MINUM TIRTA KANDILO KENA SEMPROT DPRD

PASER - Pendistribusian air bersih belakangan ini dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, kualitas air bersih diragukan dan terdapat beberapa wilayah di Kecamatan Tanah Grogot tidak mengalir hingga sepekan.

Keluhan masyarakat itu sampai ke telinga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser. Akibatnya, Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kandilo, Suryanto Agustono, dipanggil untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Dalam RDP itu, unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Paser, yakni Fadly Imawan dan Abdullah mencecar habis-habisan Direktur Perumda Air Minum Tirta Kandilo, di ruang rapat Bapekat Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, Selasa (15/8/2023).

Kekesalan lebih dulu dikeluarkan oleh Fadly Imawan. Politikus Partai Golkar itu menyebut direktur Perumda Air Minum Tirta Kandilo susah sekali diajak berkomunikasi, khususnya terkait persoalan pendistribusian air bersih di rumah warga.

"Komunikasi via WA (WhatsApp) dan panggilan telepon tidak direspon. Kami anggota DPRD tentu mewakili keluhan masyarakat, tapi kita saja tak didengar dan direspon, bagaimana dengan masyarakat," ketus Fadly.

Senada, Abdullah juga dibuat kesal dengan sulitnya direktur Perumda Air Minum Tirta Kandilo

untuk berkomunikasi via seluler. Bahkan tak segan-segan DPRD Kabupaten Paser memberikan surat teguran atas kinerja dari Suryanto Agustono.

"Ya namanya manusia biasanya ada kekeliruan. Tapi kalau ini berkelanjutan tentu kami akan mengambil solusi. Paling tidak ada surat teguran, setelah itu mengusulkan kepada bupati, kalau tak layak kenapa harus dilanjutkan," terang Abdullah.

Terlepas dari keluhan yang kesulitan berkomunikasi itu, Abdullah menyebut, diketahui salah satu persoalan tak maksimalnya pelayanan air bersih karena banyaknya pipa-pipa yang rusak, dan belum sepenuhnya telah sampai di rumah warga.

"Salah satu persoalan yang disampaikan bahwa ada pemasangan pipa ke rumah warga banyak mengalami kebocoran. Itulah yang coba diperbaiki," sebut Politikus Partai Demokrat itu.

Suryanto Agustono menyebut adanya daerah-daerah yang mengalami mati air hingga 6 hari. Antara lain, warga Jalan Sultan Khaliluddin Ibrahim, Modang, Ahmad Dahlan, Noto Sunardi, Lambung Mangkurat, Kandilo Bahari, Yos Sudarso dan RA Kartini.

Dikarenakan pipa yang ada saat ini sudah lama dan butuh peremajaan. "Ada daerah-daerah yang sudah kita petakan. Itu memang wilayah yang pipanya sudah lama. Otomatis itu mengalami tingkat kehilangan air yang sangat tinggi," katanya.

Dirinya mengatakan sudah perlu dilakukan peremajaan pipa. Hal ini telah disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser. "Ada jaringan pipa itu sejak tahun 1980an. Ini perlu perbaikan atau peremajaan," tuturnya.

Sementara terkait adanya jaringan pipa air bersih yang belum sampai di rumah warga, hal itu dikatakannya memang belum dilakukan pemasangan. Pasalnya, banyak pipa yang kini mengalami kebocoran.

"Kami takutnya kalau pasang kepada masyarakat yang belum mempunyai jaringan sampai pemasangan baru, nantinya berdampak seperti sekarang ini tidak mendapatkan air bersih. Makanya PDAM membenahi dulu jaringan pipa yang mengalami kebocoran," jelas Suryanto.

Disinggung mengenai sulitnya Anggota DPRD Kabupaten Paser berkomunikasi dengannya, Suryanto menjelaskan beberapa waktu lalu ponselnya hilang dan mengganti nomor telepon baru. "HP saya hilang," akunya.

Terkait adanya penyampaian dalam hearing apabila dinilai gagal mengatasi persoalan air bersih, DPRD tak segan-segan memberikan surat teguran. Hingga nantinya tak menutup kemungkinan dirinya lengser dari direktur Perumda Tirta Kandilo, ia tak mengkhawatirkan hal tersebut. "Itu sudah risiko pekerjaan, risiko jabatan," tutup Suryanto. **(bs)**